

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Abraham Amos, H.F, 2005, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba sampai Reformasi)*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Albert Rumokoy, Donald, 2011, *Praktik Konvensi Ketatanegaraan di Indonesia*; Kajian Perbandingan di Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda, Media Prima Aksara, Jakarta.

Albert Rumokoy, Donald & Frans Maramis, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi. 1, Cetakan. II, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ali, Achmad, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2004, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan UUD 1945*, FH UII PRESS, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-undang*, Konstitusi Press kerjasama dengan PT Syaamil Cipta Media, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta

Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Press, Jakarta.

Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dwi Anggono, Bayu, 2014, *Perkembangan Pembentukan UU di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.

Farida Indrati, Maria, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan 1: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, PT Kanisius.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Handyaningrat S, Soewarno, 1994, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, CV. Haji Masagung, Jakarta.

Huda, Ni'Matul, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*, Nusa Media, Bandung.

Huda, Ni'Matul, 2012, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan ke-6, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Hamidi, Jazim, 2006, *Revolusi Hukum Indonesia*, kerjasama Konstitusi Press, Jakarta & Citra Media, Yogyakarta.

Joeniarto, 1996, *Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tatanegara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, translated by Anders Wedberg, Russell & Russell New York, 1973.

Kosim, R. Adisapoetra, 1978, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnja
Pramita, Jakarta.

Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Sinar
Bakti, Jakarta.

Kusnardi, Moh dan Bintang Saragih, 1986, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut
Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta.

Lailam, Tanto, 2017, *Teori & Hukum Perundang-undangan*, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.

Mas, Marwan, 2018, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Edisi. 1, Cetakan. I,
PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Manan, Bagir, 1987, *Konvensi Ketatanegaraan*, Armico, Bandung.

Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Cetakan, I, Ind-
Hill-Co, Jakarta.

Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara
Indonesia*, Alumni, Bandung.

Manan, Bagir, 2003, *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru*, FH UII PRESS,
Yogyakarta.

Manan, Bagir, 2004, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cetakan Kedua, FH UII Press,
Yogyakarta.

Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, FH UII Press, Yogyakarta.

Marbun, 2012, *Hukum Administrasi Negara I*, FH UII Press, Yogyakarta.

Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. Ke 8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Mahfud, Moh, MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tatanegara Pasca Amandemen Konstitusi*, Grafindo Persada, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Revisi, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadier, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nazriyah, Riri, 2007, *MPR RI Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, FH UII Press, Yogyakarta.

Pantja Aswata, I Gde, 2008, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.

Peorwadarminata, W.J.S, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Ranggawidjaja, Rosjidi, 2006, *Menyoal Perundang-Undangan Indonesia*, PT Perca, Jakarta.

Syarif, Amiroeddin, 1997, *Perundang-undangan (Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya)*, Rineka Cipta, Bandung.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sumardjono, Maria SW, 2019, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soemantri, Sri 1985, *Ketetapan MPR/S Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara*, Remadja Karya CV, Bandung.

Sumbu, Telly, 2011, *Kamus Umum Politik & Hukum*, Media Prima Aksara, Jakarta.

Triwulan, Titik, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Yani, Ahmad, 2013, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Responsif; Catatan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Konstitusi Press, Jakarta.

Yuhana, Abdy, 2007, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Fokus Media, Bandung.

Yonas Bo'a, Fais, 2018, *UUD 1945 MPR dan Keniscayaan Amandemen*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Yuliandri, 2009, *Asas - asas Pembentukan Peraturan Perundang - undangan yang Baik*,
Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia
sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara.

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai
Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan
Perundangan Republik Indonesia.

Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis
Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara
Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan
untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran
Komunis/Marxisme-Leninisme.

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis
Permasyarakatan Rakyat.

Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka
Demokrasi Ekonomi.

Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor-Timur.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-Undangan.

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status
Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai
Dengan Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Naskah Komprehensif dan Risalah Sidang

Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Umum III, 27 Januari 2011

Mahkamah Konstitusi Indonesia, 2010, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses dan Hasil
Pembahasan: Buku X: Perubahan UUD, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan*

(*Edisi Revisi*), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi,
Jakarta.

Risalah Rapat Konsultasi Panitia Khusus DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan MPR RI, 20 Januari 2011.

Risalah Rapat Dengan Pendapat Umum dengan para Pakar, 26 Januari 2011.

Risalah Rapat Konsultasi Panitia Khusus DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan MPR RI, Jumat, 27 Januari
2011.

Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan jenis Rapat Raker III, 24 Februari 2011.

Risalah Rapat Konstitusi Panitia Khusus DPR RI Rancangan Undang-Undang tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan Mahkamah Konstitusi, 1
Maret 2011.

Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan Jenis Rapat Raker IV, 2 Maret 2011.

Risalah Rapat Panitia Khusus Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan Jenis Rapat Raker VIII, 21 Juli 2011.

Risalah Rapat Paripurna ke-36 (tiga puluh enam) Masa Sidang IV Tahun Sidang 2010-
2011, 22 Juli 2011.

Tesis dan Jurnal

Arliman, Laurensius, 2016, Kedudukan Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Lex Jurnalica*, Vol. 13, No. 3, Desember.

Attamimi, A Hamid S, 1992, *Teori Perundang-undangan Indonesia: Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman*, Pidato disampaikan pada upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di Jakarta, pada 25 April.

Fajarwati, Meriana, 2018, Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 1.

Farida Indrati, Maria, 2005, Tinjauan Terhadap Materi dan Kedudukan Ketetapan MPR/MPRS Staatsgrundgesetz (Hasil Penelitian Terhadap Ketetapan MPRS/MPR sejak Tahun 1960 s/d 2002), *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 2, No. 4 Juli.

Fitri Meilani Langi, 2013, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Dalam Perundang-Undangan DI Indonesia, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. I, No.I, Januari-Maret.

Meirina Fajarwati, 2018, “Konstitusionalitas Ketetapan MPR Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 1.

Nisrina Irbah Sati, 2019, “Ketetapan MPR Dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 4.

Nurbaningsih, Enny, 2004, Hierarki Baru Peraturan Perundang-undangan, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume X, Nomor 48.

Rasji, *Fungsi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Pengaturan Negara*, Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Widyati, 2016, “Perbandingan Materi Muatan Ketetapan MPR Pada Masa Pemerintahan Orde Lama, Orde Baru dan Era Reformasi”, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. III No. 1.

Artikel dalam Antologi dengan Editor

Hastuti, Sri, 2015, *Kedaulatan Rakyat, MPR dan Ketetapan MPR*, dalam Ni’Matul Huda (Ed.), 2015, *Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, FH UII PRESS, Yogyakarta.

Muntoha, 2015, *Politik Hukum Masuknya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, dalam Ni’Matul Huda (Ed.), 2015, *Problematika Ketetapan MPR Dalam Perundang-Undangan Indonesia*, FH UII PRESS, Yogyakarta.

Internet

Petrus, Steven, *Inkonsistensi Ketentuan Hukum dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara* <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/20378>
diakses pada tanggal 2 Juli 2022.

Lihat dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) <https://aphtnhan.id/pengurus/struktur>, diakses pada tanggal 19 Mei 2023, Pukul 22:35 WIB.